

**PERAN PEMERINTAH DESA DALAM UPAYA
PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT DI DESA
LUMBEWE KECAMATAN BURAU**



IAIN PALOPO

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo

Oleh

**HERMAWATI
NIM.1504010062**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO
2019**

**PERAN PEMERINTAH DESA DALAM UPAYA
PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT TANI DI DESA
LUMBEWE KECAMATAN BURAU**



IAIN PALOPO

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo

Oleh

**HERMAWATI
NIM.1504010062**

Dibimbing Oleh:

Dr. Ahmad Siarief Iskandar, S.E., M.M.
Zainuddin, S.E., M.Ak.

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO
2019**

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hermawati

NIM : 1504010062

Jenjang : S1

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Jurusan : Ekonomi Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya buat ini merupakan hasil dari karya sendiri yang berasal dari penelitian langsung di Desa Lumbewe Kecamatan Burau dan merupakan hasil pengolahan fikiran mandiri yang berdasar dari bukti – bukti penelitian. Saya tidak mencantumkan bahan – bahan penelitian yang telah di publikasikan sebelumnya atau yang telah ditulis orang lain. Jika dikemudian hari hasil penelitian ini terbukti merupakan duplikat atau plagiat yang telah dibuat sebelumnya maka skripsi dan gelar yang telah diperoleh dapat dibatalkan.

Palopo, September 2019

Yang menyatakan



hermawati

NIM.15 0401 0062

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul **"Peran Pemerintah Desa Dalam Upaya Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Tani di Desa Lumbewe Kecamatan Bauru"** yang ditulis oleh **Hermawati** dengan NIM **15 0401 0062** Mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, yang dimunaqasyahkan pada Jum'at, **20 September 2019 M** bertepatan dengan **20 Muharram 1441 H**, telah diperbaiki sesuai dengan catatan dan permintaan tim penguji dan diterima sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E.).

Palopo, 9 Oktober 2019 M
9 Safar 1441 H

TIM PENGUJI

- | | | |
|---|-------------------|---------|
| 1. Dr. Hj. Ramlah M, M.M. | Ketua Sidang | (.....) |
| 2. Dr. Muh. Ruslan Abdullah, S.EI., M.A. | Sekretaris Sidang | (.....) |
| 3. Dr. Rahmawati, M.Ag. | Penguji I | (.....) |
| 4. Dr. Muh. Ruslan Abdullah, S.EI., M.A. | Penguji II | (.....) |
| 5. Dr. Ahmad Syarief Iskandar, S.E., M.M. | Pembimbing I | (.....) |
| 6. Zainuddin S., SE., M.Ak. | Pembimbing II | (.....) |

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Ketua Program Studi
Ekonomi Syariah



Dr. Hj. Ramlah M, M.M.
NIP. 19610208 199403 2 001



Dr. Hermawati, M.EI.
NIP. 19810213 200604 2 002

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT karena limpahan rahmat dan karunia-Nya yang telah memberikan penulis kesempatan untuk menyelesaikan skripsi yang berjudul “Peran Pemerintah Desa dalam Upaya Pemberdayaan Ekonomi Di Desa Lumbewe Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur,” sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Ekonomi (SE).

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari bahwa betapa sulitnya menyelesaikan skripsi ini banyak hambatan dan tantangan yang dihadapi penulis, namun dengan adanya berbagai pihak yang membantu sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Untuk itu, melalui lembaran prakata ini penulis ingin menghaturkan rasa hormat, penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang teristimewa kedua orang tua tercinta ayahanda Abdul Latif, ibunda Rabbi, dan kepada suami tercinta Muhammad Nurhidayat yang penuh kesabaran, pengorbanan, serta do'a yang tiada hentinya untuk mendukung penulis sehingga terselesainya skripsi ini, juga kepada:

1. Rektor IAIN Palopo bapak Dr. Abdul Pirol, M. Ag, Wakil Rektor I bapak Dr. H. Muammar Arafat, M.H. Wakil Rektor II bapak Dr. Ahmad Syarief Iskandar,

S.E., M.M dan Wakil Rektor III bapak Muhaemin, M.A. yang telah membina dan berupaya meningkatkan mutu perguruan tinggi tempat penulis menuntut ilmu.

2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo Dr. Hj. Ramlah Makkulasse, M.M. Wakil Dekan I bapak Muhammad Ruslan Abdullah, S.E.I., M.A. Wakil Dekan II bapak Tadjuddin, S.E., M.Si., Ak., CA. Wakil Dekan III bapak Dr. Takdir, S.H., M.H. dan Ketua Program Studi Ekonomi Syariah, dalam hal ini ibu Dr. Fasiha, M.E.I. yang telah banyak memberikan motivasi serta mencurahkan perhatiannya dalam membimbing dan memberikan petunjuk sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

3. Pembimbing I bapak Dr. Ahmad Syarief Iskandar, S.E., M.M dan Pembimbing II bapak Zainuddin S.SE., M. Ak. yang senantiasa mengkritik, mengoreksi, memberikan saran dan masukan serta motivasi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

4. Bapak Ibu Dosen dan Staf IAIN Palopo yang telah membantu dan memberikan tambahan ilmu kepada penulis.

5. Kepala perpustakaan dan segenap staf IAIN Palopo yang telah membantu peminjaman buku yang dibutuhkan oleh penulis

6. Kepada saudara-saudaraku, mertuaku, dan seluruh keluargaku yang tidak sempat penulis sebutkan yang selalu memberikan dukungan dan motivasi selama penyusunan sampai selesainya skripsi ini.

7. Segenap rekan-rekan mahasiswa IAIN Palopo yang telah membantu, memotivasi, dan memberikan saran selama penyusunan skripsi ini.

8. dan semua pihak yang turut membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari masih banyaknya kekurangan dalam penulisan skripsi ini, kiranya ada kekurangan penulis mohon kritik dan saran yang membangun agar penulisan kedepannya semakin baik lagi. Semoga hasil penelitian ini dapat berguna dan bermanfaat untuk ilmu pengetahuan.

Palopo, September 2019

Hermawati

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN JUDUL.....	i
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	v
NOTA DINAS PENGUJI	vii
PERSETUJUAN PENGUJI	ix
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	x
PRAKATA.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR TABEL.....	xix
DAFTAR GAMBAR	xx
ABSTRAK	xxi
BAB I Pendahuluan	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	2
C. Tujuan Penulisan.....	2
D. Manfaat Penelitian	6
E. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup.....	7
BAB II Landasan Teori	9
A. Penelitian Terdahulu Yang <i>Relevan</i>	9
B. Kajian Pustaka.....	14

C. Kerangka Pikir	34
BAB III Metode Penelitian.....	35
BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan.....	42
A. Hasil Penelitian	42
B. Pembahasan Hasil Penelitian	46
BAB V Penutup	53
A. Kesimpulan	53
B. Saran.....	54
Daftar Pustaka.....	56
Lampiran	

DAFTAR GAMBAR

3.1	Keranga pikir.....	34
4.1	Struktur Desa.....	45

DAFTAR TABEL

4.1	Luas Lahan Menurut Kegunaannya	47
-----	--------------------------------------	----

ABSTRAK

Nama : Hermawati

NIM : 1504010062

Judul : Peran pemerintah dalam upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat di desa lumbewe kecamatan burau

Perkembangan dan perubahan secara global saat ini sangatlah cepat, hal ini juga pasti akan mempengaruhi setiap aspek di masyarakat. Fokus pembahasan pemberdayaan masyarakat adalah pada sektor pertanian dan hubungannya dengan pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis masalah yang sedang dihadapi oleh masyarakat desa dan kebijakan atau program apa saja yang dilakukan pemerintah untuk dapat meningkatkan perekonomian masyarakat. Permasalahan yang terjadi saat ini adalah kurangnya wawasan dan *skill* SDM. Masyarakat lebih memilih belajar dari para pendahulunya dengan tehnik bertani yang kurang memenuhi standar untuk saat ini dari pada mengikuti pelatihan dan penyuluhan oleh pemerintah.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan menggunakan sumber data langsung di tempat penelitian maupun data yang didapatkan saat penelitian berlangsung. Dalam melakukan program pemberdayaan masyarakat, pemerintah memiliki beberapa program diantaranya yaitu pengalihan dari lahan perkebunan ke lahan pertanian, pelatihan dan pengajaran, peningkatan SDM melalui jalur dagang, peningkatan mutu dan kualitas petani di desa lumbewe, peningkatan *infrastruktur*, dan penyediaan kebutuhan pupuk dan obat – obatan. Dengan metode yang dilakukan pemerintah tersebut kedepannya diharapkan warganya memiliki kualitas baik dari segi SDMnya maupun hasil panennya.

Hasil yang didapat dari penerapan program adalah peningkatan hasil panen dan kualitas panennya, peningkatan kemampuan individual petani dalam mengelola lahan, peningkatan infrastruktur untuk menunjang petani dalam bercocok tanam. Dari hasil program selama 5 tahun, dapat disimpulkan bahwa program pemerintah desa dapat meningkatkan perekonomian desa. Kekurangan yang terjadi saat penelitian adalah, kurangnya konsisten warga dalam mendukung program desa sehingga program pemerintah menjadi tidak optimal.

Kata kunci: ekonomi, pemberdayaan, pemerintahan, program, infrastruktur

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan Negara Republik Indonesia pada saat ini terus mengalami peningkatan. Peningkatan ini didasari oleh pelaksanaan pembangunan nasional yang merata diseluruh Indonesia. Dari peningkatan pembangunan tersebut maka akan mempengaruhi pertumbuhan daerah sehingga laju pertumbuhan antara desa dan kota makin seimbang. Pembangunan nasional, pemerintah meningkatkan pembangunan pada pedesaan. Peningkatan pembangunan tersebut didasari oleh kenyataan bahwa mayoritas penduduk yang tinggal dan bekerja umumnya petani dan pedagang.

Pemerintah desa merupakan pemerintah terendah sebagai penghubung pemerintah Indonesia dengan masyarakat, maka kedudukan desa dalam proses pembangunan sangatlah penting. Karena desa merupakan daerah yang harus dimaksimalkan, pemerintah memberikan program-program pembangunan, pelatihan, dan pemberian sarana infrastruktur untuk memenuhi kebutuhan desa. Guna memenuhi unsur pemerataan pembangunan langkah seperti program-program pemerintah, pemberian pelatihan kepada masyarakat, dan pembangunan infrastruktur yang hasil-hasilnya berujung pada kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah desa bertanggung jawab secara langsung serta memelihara masyarakatnya untuk mempertahankan standar hidup yang layak maka pemerintah desa berhak mengelola sumber daya alam yang ada untuk meningkatkan

kesejahteraan masyarakatnya. Pengakuan islam terhadap hak masyarakat atas seluruh sumber kekayaan (alam) dapat dilihat dalam Qur'an surah Al-Baqarah (2): 29 berbunyi:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ أَسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٩﴾

Terjemahnya:

“Dialah (Allah) yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untukmu kemudian Dia menuju ke langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit, lalu Dia menyempurnakannya menjadi tujuh langit. Dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu.”¹

Ayat di atas menjelaskan bahwa setiap individu dalam masyarakat berhak atas hidup yang layak berkat manfaat dari sumber kekayaan yang ada. Jadi, siapa saja yang mampu bekerja di sektor publik atau sektor manapun negara harus memberinya kesempatan. Sementara siapa saja yang tidak mampu memanfaatkan kesempatan yang tersedia, negara wajib memberinya manfaat kekayaan alam dengan menyediakan berbagai sarana baginya agar dapat memelihara standar hidup yang layak.²

Pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya manusia merupakan suatu hal yang pengelolaannya harus tepat agar pemanfaatan sumber daya yang tersedia dengan cara yang bijak akan menghasilkan dampak efisiensi penggunaan sumber

¹Muhammad Shohib, Ma, *Al-Quran Tajwid Dan Terjemahnya Dilengkapi Dengan Dengan Asbabun Nuzul dan Hadits Sahih*, (Bogor: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2007), h.5.

²Muhammad Baqir Ash Shadr, *Buku Induk Ekonomi Islam Iqtishaduna*, (Jakarta Zahra, 2008), h.462.

daya dan sebagai ciri khas daerah. Contoh pemanfaatan bijak ini dapat dilihat di desa daerah Sumedang yaitu suatu daerah yang mayoritasnya adalah petani kedelai yang hasil olahannya tersebut berupa makanan tahu. Dari pengelolaan tersebut dapat disimpulkan dengan pemanfaatan lahan dan hasil bumi yang tepat serta mengetahui potensi daerah akan memaksimalkan produk yang berkarakter dan bernilai jual. Olahan tersebut sampai saat ini terkenal dengan nama tahu Sumedang. Di daerah Sumedang, desa telah mengatur bahan pokok yaitu berupa kedelai yang ditanam oleh mayoritas penduduknya untuk memenuhi kuota produksi. Dari proses tersebut campur tangan pemerintah desa itu memfasilitasi produksi dan pembelian hasil bumi sehingga baik petani maupun desa sama-sama sejahtera.

Berbicara mengenai kesejahteraan masyarakat sebagaimana diketahui kesejahteraan erat kaitannya dengan pemberdayaan. Kaitan tersebut karena pemberdayaan merupakan suatu cara untuk mewujudkan kesejahteraan yang menjadi hak seluruh masyarakat. Maka dari itu, pembangunan pedesaan merupakan bagian dari pembangunan Nasional yang didalamnya terdapat usaha peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pengelolaan sumber potensi alam yang hasilnya untuk kepentingan masyarakat dalam rangka peningkatan kesejahteraan mereka.

Potensi sumber daya alam di desa Lumbewe umumnya diarahkan pada sektor pertanian karena memiliki potensi pertanian yang cukup baik. Pemanfaatan kekayaan alamnya ini tidak lepas dari peran pemerintah desa yang terus menerus memberikan program-program guna memaksimalkan potensi desa untuk kesejahteraan masyarakatnya. Program-program tersebut berupa pelatihan dan pembangunan

infrastruktur yang berguna bagi kepentingan masyarakat yang dapat mengatasi masalah yang terjadi didalam masyarakat serta peningkatan mutu dari hasil produksi. Melalui program-program tersebut, pemerintah dapat menyalurkan bantuan yang berupa bantuan material maupun non material. Penyaluran bantuan non material umumnya yaitu pelatihan masyarakat, pelatihan aparatur desa dan penyuluhan di desa tersebut. Sedangkan yang berupa material berupa fasilitas-fasilitas yang menunjang hasil produksi masyarakat seperti irigasi, lumbung padi, penyediaan obat-obatan dan pupuk.

Permasalahan yang terjadi di desa Lumbewe yaitu semakin hari jumlah masyarakat yang masih memilih bertani semakin kecil. Masyarakat lebih tertarik untuk bekerja sebagai karyawan disebuah perusahaan dan di instansi-instansi pemerintah serta swasta lainnya sehingga sektor pertanian dianggap tidak menjanjikan lagi. Dari data yang didapatkan menunjukkan mayoritas pemuda dengan lulusan SMA atau sederajat rata-rata tidak melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, lebih memilih bekerja sebagai pedagang, buruh, dan banyak pula yang bekerja di luar daerah sebagai karyawan perusahaan. Dari permasalahan ini, pergeseran petani yang lama (tua) lambat laun akan digantikan dengan generasi mudanya sekarang. Dengan demikian, desa seharusnya dapat mengantisipasi dan memberikan penyuluhan dan pelatihan serta memotivasi masyarakat agar mendapat dorongan dan menyadari bahwa sektor pertanian adalah sektor kebutuhan yang paling penting bagi masyarakat.

Permasalahan lain yang terjadi kurangnya bobot hasil panen dan banyaknya angka panen di daerah Lumbewe dengan rata-rata kualitas beras yang dihasilkan hanya mencapai kualitas standar. Maka yang diperlukan seharusnya pemerintah desa memberi perbaikan pada infrastrukturnya dan penyediaan bibit maupun obat-obatan. Dalam hal ini, pemerintah kurang tanggap dalam masalah dengan masalah yang dihadapi sehingga kurang puasnya masyarakat dengan hasil tersebut. Tentunya masyarakat menginginkan bibit unggul untuk menggantikan bibit yang dipakai saat ini. Karena jika bibit yang saat ini dipakai hasil produksinya tidak maksimal. Langkah tepat yang dilakukan desa seharusnya desa membuka kerja sama dengan dinas pertanian maupun dinas ketenagakerjaan untuk meningkatkan kesejahteraan daerah tersebut.

Sebagaimana desa pada umumnya, seharusnya desa memiliki sistem pengelolaan hasil produksi, hasil bumi, dan hasil yang diperoleh dari sumber daya manusia secara mandiri sehingga pemasukan desa dan pengelolaan hasil produksi menjadi maksimal. Dengan pengelolaan yang baik maka kesejahteraan desa dan masyarakat menjadi lebih baik. Jika kesejahteraan membaik, maka tujuan utama pemerintah dalam pembangunan desa sebagai pondasi Negara akan membaik atau tercapai.

Berdasarkan pertimbangan latar belakang masalah diatas maka penulis tertarik untuk mengangkat topik penelitian dengan judul **“Peran Pemerintah Desa dalam Upaya Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Desa Lumbewe Kecamatan Burau”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah upaya yang dilakukan pemerintah desa dalam meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat di desa Lumbewe Kecamatan burau?
2. Apa saja langkah yang dilakukan pemerintah desa dalam memberdayakan ekonomi masyarakat di desa Lumbewe Kecamatan Burau?

C. Tujuan Penulisan

1. Untuk menganalisa peran pemerintah desa dalam upaya peningkatan ekonomi di desa Lumbewe Kecamatan Burau
2. Untuk melakukan langkah yang tepat terhadap program pemerintah desa agar tercapainya tujuan pemberdayaan ekonomi masyarakat desa Lumbewe Kecamatan Burau

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang jelas mengenai **“Peran Pemerintah Desa dalam Upaya Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Desa Lumbewe Kecamatan Burau”**. Dari informasi tersebut diharapkan mampu memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis yaitu:

1. Manfaat teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan informasi secara umum mengenai peran pemerintah desa dalam memberdayakan ekonomi masyarakat di desa lumbewe.
 - b. Dapat dijadikan bahan acuan untuk penelitian selanjutnya

2. Manfaat Praktis

- a. Untuk memperoleh data yang berkenaan dengan objek yang diteliti yang kemudian akan dituangkan dalam suatu karya tulis pada ilmu ekonomi dan bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo.
- b. Dapat dijadikan sebagai sumbangan pemikiran dan masukan ilmu bagi pembaca yang berkeinginan masuk dalam dunia pemerintahan.

E. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian

Definisi operasional merupakan segala sesuatu yang digunakan untuk menjabarkan suatu variabel yang mungkin akan timbul dalam suatu karya ilmiah sehingga diperoleh informasi mengenai suatu penelitian, kemudian ditarik sebuah kesimpulan.

Untuk menghindari terjadinya perbedaan persepsi dalam menginterpretasikan pengertian masing masing dalam konteks ini, maka definisi operasional secara jelas dijabarkan sebagai berikut:

1. Peran pemerintah desa adalah menyusun, mengatur, dan memberikan kewenangan keputusan untuk melaksanakan pembangunan terkait dengan pengelolaan wilayah tingkat desa.
2. Pemberdayaan ekonomi masyarakat merupakan upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat dengan memaksimalkan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya yang lain agar dapat memperbaiki

kondisi masyarakat agar mampu mandiri sehingga masyarakat dan desa dapat sejahtera.

Ruang lingkup penelitian merupakan segala aspek yang dibatasi pada saat melakukan penelitian agar penelitian dapat fokus pada penelitian yang diharapkan.

Ruang lingkup itu meliputi:

1. Penelitian ini dilaksanakan di desa Lumbewe Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur.
2. Data yang diambil memuat isi tentang profil desa, jumlah kependudukan, profesi penduduk, tingkat kelahiran dan kematian, dan program-program desa berasal dari pemerintah desa Lumbewe Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur.
3. Data mengenai pertanian dan hasil panen diperoleh dari dinas pertanian dan perkebunan Luwu Timur.
4. Penelitian ini merupakan analisa pengambilan data selama lima tahun terakhir.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian ini akan mengemukakan penelitian sebelumnya yang sudah pernah dibuat yang dianggap memiliki kesamaan dengan judul atau topik yang penulis teliti terkait dengan “peran pemerintah dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat”.

Beberapa hasil penelitian yang relevan mengenai peran pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat, diantaranya:

1. Muhammad Hafid Fadillah dalam penelitiannya yang berjudul “Peran Pemerintah dalam Upaya Meningkatkan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Kecamatan Bara kota Palopo” menyimpulkan bahwa dampak pemberdayaan pemerintah terhadap peningkatan ekonomi sangatlah menjanjikan bagi setiap usaha masyarakat sehingga pemerintah dalam mensejahterahkan masyarakat sangat mampu untuk membantu masyarakat mengembangkan setiap potensi yang ada dengan baik dan sangatlah terbukti bahwa pemerintah telah berhasil dalam mensejahterahkan masyarakat guna menambah tingkat pendapatan dan nilai tambah bagi masyarakat. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pengumpulan

data menggunakan analisis kualitatif , mengolah data berdasarkan kepada data-data tertulis atau data lisan.³

2. Sri Susanti dalam penelitiannya yang berjudul “Peranan Pemerintah Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Sukamaju Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai”. Tujuan penelitiannya yaitu mengetahui peranan pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat serta mengetahui faktor pendukung dan penghambat pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakatnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah desa masih kurang berhasil dalam memberdayakan masyarakat khususnya pada aspek sosial, maupun pemanfaatan sumber daya dan keterampilan. Pada aspek sosial diketahui bahwa pemerintah desa dalam memberikan motivasi pada kegiatan pembangunan pertanian masih kurang berhasil. Hal ini dikarenakan pemberian motivasi dalam bentuk penghargaan tidak pernah diberikan kepada petani maupun kelompok tani yang hasil pertaniannya meningkat. Sedangkan pada aspek pemanfaatan sumber daya dan keterampilan menunjukkan bahwa peran yang diberikan kepala desa dengan memberikan pelatihan kepada petani berupa pencegahan bakteri tanam karet, dimana pelatihan tersebut hanya dilaksanakan pada dusun I dan III sehingga tidak melingkupi seluruh petani serta tidak memberikan pelatihan teknik panen yang baik untuk meningkatkan hasil pertanian. Sehingga pelatihan yang diberikan kepada petani kurang dapat

³Muhammad Hafid Fadillah, *Strategi Pemerintah Dalam Upaya Meningkatkan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Di Kecamatan Bara Kota Palopo*, Skripsi (Palopo:Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri PALOPO, 2016).

meningkatkan keterampilan dalam bidang pertanian. Adapun faktor pendukung yaitu kondisi atau lingkungan yang baik dan faktor penghambat yaitu kurangnya keterampilan masyarakat. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu jenis penelitian kualitatif dan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode analisis data deskriptif kualitatif dari Milles dan Huberman.⁴

3. Muhammad Indra Wijaya dalam penelitiannya dengan judul “Peranan Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Di Bidang Pertanian (Studi: Desa Toapaya Selatan Kecamatan Toapaya Kabupaten Bintun)”. Hasil penelitian menunjukkan kurangnya peran Pemerintah dalam pemberdayaan ekonomi dikarenakan panen petani menunjukkan tidak mencukupi bagi masyarakat untuk meningkatkan kebutuhan ekonomi yang pada akhirnya masyarakat lebih memilih bertani sambil bekerja sebagai buruh. Kurangnya kegiatan penyuluhan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap petani dan juga tidak meratanya kegiatan penyuluhan tersebut yang mana sebaiknya ada kerjasama yang baik dari pemerintah daerah dan pemerintah desa dalam mengadakan penyuluhan. Pemerintah tidak membantu petani untuk memasarkan hasil panennya, sehingga petani harus menjual sendiri hasil panennya dengan harga yang jauh lebih murah. Kurangnya bantuan-bantuan pemerintah seperti modal dan peralatan pertanian. Sebagai dampak dari kurangnya bantuan dari pemerintah tersebut adalah terbatasnya lahan pertanian dan

⁴Sri Susanti, *Peran Pemerintah Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Sukamaju Kecamatan Tenggarong*, Jurnal Ilmu Administrasi Negara, ISSN 0000-0000, ejournal.an.fisip-unmul.ac.id (diakses 3 Mei 2018).

tanaman untuk ditanam. Selain itu juga pendapat an yang selalu mengalami naik dan turun karena para petani harus menyediakan modal sendiri untuk kegiatan pertaniannya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu jenis penelitian kualitatif.⁵

4. Sigit Suwardianto dalam penelitiannya yang berjudul "Peran Kepala Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Sidoagung Kecamatan Godean Kabupaten Sleman" tujuan penelitian ini adalah mendiskripsikan peranan kepala desa dalam memberdayakan masyarakat desa Sidoagung Kecamatan Godean Kabupaten Sleman serta mengetahui faktor-faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi peranan kepala desa dalam memberdayakan masyarakat desa Sidoagung Kecamatan Godean Kabupaten Sleman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepala desa telah melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat di desa sidoagung dengan beberapa tahap yaitu, pemberdayaan dalam pembangunan prasarana fisik dan prasarana non fisik, dengan indicator peranan kepala desa dalam pembinaan masyarakat dan peranan kepala desa dalam koordinasi pembangunan partisipatif yang meliputi bidang ekonomi, kesehatan, sosial dan politik. Sasaran pemberdayaan masyarakat mengarah pada pembinaan generasi muda dan perbaikan ibu hamil dan balita. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi peranan kepala desa dalam pemberdayaan masyarakat terdiri dari faktor pendukung dan faktor

⁵Muhammad Indra Wijaya, *Peranan Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Di Bidang Pertanian (Studi: Desa Toapaya Selatan Kecamatan Toapaya Kabupaten Bintun)*", Jurnal, (Tanjung Pinang: Universitas Maritime Raja Uli Haji, 2017, diakses 10 Agustus 2018)

penghambat. Faktor pendukungnya yaitu keturunan, kebiwaan, dan kekuasaan. Sedangkan faktor penghambatnya yaitu kondisi penduduk, partisipasi penduduk, dan fasilitas atau peralatan. Pembinaan kehidupan masyarakat dilakukan oleh kepala desa dengan konsep kesadaran dan kemauan masyarakat melalui koordinasi secara partisipatif dari masyarakat sehingga peranan kepala desa dalam pemberdayaan masyarakat berjalan efektif. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data wawancara, observasi dan dokumentasi. Serta analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu display data, reduksi data, dan pengambilan kesimpulan.⁶

5. Rokki dalam penelitiannya yang berjudul “Peran Pemerintah Desa dalam Pemberdayaan Petani Rumput Laut di Desa Burau Pantai” dengan kesimpulan bahwa peran pemerintah desa bagi para petani rumput laut memberikan dampak positif terhadap peningkatan usaha masyarakat dari segi pendapatan. Strategi yang dilakukan pemerintah yaitu dengan memberikan motivasi dan juga sebagai fasilitator dengan mengundang pihak dari luar untuk memberikan bimbingan dan pelatihan terkait mengelola rumput laut yang lebih baik. Selain itu, pemerintah juga membentuk beberapa kelompok tani sebagai strategi untuk membantu petani rumput laut mendapatkan bantuan modal pembelian bibit atau pun fasilitas alat dari pemerintah

⁶Sigit Suwardianto, *Peranan Kepala Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Sidoagung Kecamatan Godean Kabupaten Sleman*, Skripsi, (Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta, 2015) diakses 11 April 2019

pusat maupun pemerintah daerah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu jenis penelitian kualitatif.⁷

B. Kajian Pustaka

1. Peranan

Peranan (*role*) adalah aspek yang dinamis dari kedudukan (*status*). Peranan dapat membimbing seseorang dalam berperilaku, karena fungsi peran sendiri adalah untuk memberikan arah pada proses sosialisasi, pewarisan tradisi, kepercayaan, nilai-nilai, norma-norma dan pengetahuan. Peranpun dapat mempersatukan kelompok atau masyarakat, serta dapat menghidupkan sistem pengendalian dan control sehingga dapat melestarikan kehidupan masyarakat.⁸

Secara sosiologis peranan adalah aspek dinamis yang berupa tindakan atau perilaku yang dilaksanakan oleh seseorang yang menempati atau memangku suatu posisi dan melaksanakan hak-hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya. Jika seseorang menjalankan peran tersebut dengan baik, dengan sendirinya akan berharap bahwa apa yang dijalankan sesuai dengan keinginan diri lingkungannya. Peran secara umum adalah kehadiran di dalam menentukan suatu proses keberlangsungan.⁹

⁷Rokki, *Peran Pemerintah Desa dalam Pemberdayaan Rumput Laut di Desa Burau Pantai*, (Skripsi IAIN Palopo Tahun 2016)

⁸Narwoko dan Bagong Suyanto, *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan* (Jakarta: Kencana, 2014) h. 160

⁹Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta Press, 2002), h. 242

Selain itu, perananpun lebih banyak menunjukkan pada fungsi, penyesuaian diri dan sebagai suatu proses. Jadi tepatnya adalah bahwa seseorang (lembaga) menduduki suatu posisi atau tempat dalam masyarakat serta menjalankan suatu peranan. Suatu peranan mencakup tiga hal yaitu:

- a. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti meliputi rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
- b. Peranan dalam konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- c. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur masyarakat.¹⁰

Adapun jenis-jenis peran adalah sebagai berikut:

- a. Peranan normatif adalah peran yang dilakukan seseorang atau lembaga yang didasarkan pada seperangkat norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat.
- b. Peranan ideal adalah peranan yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada nilai-nilai ideal atau yang seharusnya dilakukan sesuai dengan kedudukannya di dalam suatu sistem.
- c. Peranan faktual adalah peranan yang dilakukan seseorang atau lembaga yang didasarkan pada kenyataan secara kongkrit di lapangan atau kehidupan sosial yang terjadi secara nyata.¹¹

¹⁰ *Ibid.* h. 242

¹¹ *Ibid.* Soerjono Soekanto, h. 243

2. Pengertian Desa

a. Pengertian Desa

Desa di Indonesia pertama kali ditemukan oleh Mr. Herman Warner Muntinghe, seorang Belanda anggota Raad van Indie pada masa penjajahan kolonial Inggris, yang merupakan pembantu Gubernur Jendral Inggris yang berkuasa pada tahun 1811 di Indonesia. Dalam sebuah laporannya tertanggal 14 Juli 1817 kepada pemerintahannya disebutkan tentang adanya desa-desa di daerah-daerah pesisir utara Pulau Jawa, dan dikemudian hari ditemukan juga desa-desa di Kepulauan luar Jawa yang kurang lebih sama dengan desa yang ada di Jawa.

Istilah desa berasal dari bahasa India *Swadesi* yang berarti tempat asal, tempat tinggal, negeri asal, atau tanah leluhur yang merujuk pada satu kesatuan hidup, dengan satu kesatuan norma, serta memiliki batas yang jelas. Istilah desa dan pedesaan sering dikaitkan dengan pengertian *rural* dan *village* yang dibandingkan dengan kota (city/town) dan perkotaan (urban). Konsep pedesaan dan perkotaan mengacu kepada karakteristik masyarakat, sedangkan desa dan kota merujuk pada suatu wilayah administrasi atau tutorial, dalam hal ini pedesaan mencakup beberapa desa.¹²

Desa dalam arti umum juga dapat dikatakan sebagai permukiman manusia yang letaknya diluar kota dan penduduknya bermata pencaharian dengan bertani atau bercocok tanam.¹³

¹² Numan, *Strategi Pembangunan Daerah*, (Jakarta: Rajawali Grafindo Persada, 2015), h. 226

¹³ N. Daldjoeni, *Interaksi Desa Kota*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1987), h. 11

Berdasarkan intruksi Menteri Dalam Negeri RI Nomor 11 tahun 1972 tentang pelaksanaan klarifikasi dan tipologi desa di Indonesia digolongkan dalam tiga tingkatan yakni:

1) Desa Swadaya

Desa swadaya merupakan desa yang paling terbelakang dengan budaya kehidupan terdisional dan sangat terikat dengan adat istiadat. Desa ini biasanya memiliki tingkat kesejahteraan yang sangat rendah, sarana dan prasarana minim serta sangat tergantung pada alam. Secara umum ciri-ciri desa swadaya sebagai berikut:

- a) Lebih dari 50% penduduk bermata pencaharian di sektor primer (menangkap ikan, bercocok tanam secara tradisional).
- b) Produksi desa sangat rendah dibawah 50 juta rupiah per tahun.
- c) Adat istiadat masih mengikat kuat.
- d) Pendidikan dan keterampilan rendah, kurang dari 30% yang lulus sekolah dasar.
- e) Prasarana masih sangat kurang.
- f) Kelembagaan formal dan informal kurang berfungsi dengan baik.
- g) Swadaya masyarakat masih sangat rendah sehingga kerap kali pembangunan desa menunggu intruksi dari atas.¹⁴

2) Desa Swakarsa

¹⁴ *Ibid*, Nurman, h. 231

Desa swakarsa merupakan desa yang mengalami perkembangan lebih maju dibandingkan desa swadaya. Desa ini telah memiliki landasan lebih kuat dan berkembang lebih baik serta lebih kosmopolit. Desa swakarsa penduduknya mulai melakukan peralihan mata pencaharian dari sektor primer ke sektor lain. Secara umum ciri-ciri desa swakarsa sebagai berikut:

- a) Mata pencaharian penduduk mulai bergeser dari sektor primer ke industri, penduduk desa mulai merupakan teknologi pada usaha taninya, kerajinan dan sektor sekunder mulai berkembang.
- b) Produksi desa masih pada tingkat sedang, yaitu 50-100 juta rupiah per tahun.
- c) Kelembagaan formal dan informal mulai berkembang, adat 4-6 lembaga yang hidup.
- d) Keterampilan masyarakat dan pendidikannya pada tingkat sedang 30-60% telah lulus SD bahkan ada beberapa yang telah lulus sekolah lanjutan.
- e) Fasilitas dan prasarana mulai ada meski tidak lengkap, paling tidak ada 4-6 sarana umum yang tersedia di masyarakat.
- f) Swadaya masyarakat dan gotong royong dalam pembangunan desa mulai tampak meski tidak sepenuhnya.¹⁵

¹⁵ *Ibid.* Nurman. h. 231-232

3) Desa Swasembada

Desa Swasembada merupakan desa yang memiliki kemandirian lebih tinggi dalam segala bidang terkait dengan aspek sosial dan ekonomi. Desa swasembada mulai berkembang dan maju dengan petani yang tidak terikat dengan adat istiadat atau pola tradisional. Ciri-ciri desa swasembada sebagai berikut:

- a) Mata pencaharian penduduk sebagian besar disektor jasa dan perdagangan.
- b) Produksi desa tinggi dengan penghasilan usaha diatas 100 juta per tahun.
- c) Adat istiadat tidak mengikat lagi meskipun sebagian masyarakat masih menggunakannya.
- d) Kelembagaan formal dan informal telah berjalan sesuai dengan fungsinya dan telah hidup.
- e) Keterampilan masyarakat dan pendidikannya pada tingkat 60% telah lulus SD sekolah lanjutan bahkan ada beberapa yang telah lulus perguruan tinggi.
- f) Fasilitas dan prasarana mulai lengkap dan baik.
- g) Penduduk sudah memiliki inisiatif sendiri melalui swadaya dan gotong royong dalam pembangunan desa.¹⁶

Adapun fungsi dari desa yaitu:

¹⁶ *Ibid*, Nurman, h. 232

a) Desa sebagai sumber pangan

Di dalam hubungannya dengan kota didekatnya desa merupakan daerah pendukung (*hinterland*) berfungsi menyediakan kebutuhan pokok kota.

b) Desa sebagai sumber ekonomi

Desa memiliki potensi sumber bahan mentah (*raw material*) dan sumber tenaga kerja (*man power*) yang memiliki nilai ekonomi sangat tinggi. Tenaga kerja sangat penting karena setiap kegiatan membutuhkan tenaga kerja. Jika kedua potensi tersebut dapat dimanfaatkan melalui usah masyarakat maka perekonomian desa dapat maju dan berkembang.

c) Desa sebagai mitra pembangunan wilayah kota

Fungsi desa sebagai sumber pangan dan sumber ekonomi membuktikan adanya hubungan timbal balik antara kota dan desa. Desa dapat menyediakan bahan mentah, bahan pangan, dan sumber daya manusia bagi kota. Sebaliknya, desa semakin maju secara ekonomi.¹⁷

3. Pemerintahan Desa

Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus

¹⁷ Samadi, *Interkasi Desa Dan Kota*, (Yogyakarta: Yudhistira, 2007), h. 101-102

kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat. Menurut susunan pemerintahan desa yang diatur dalam pasal 202 UU No. 32 Tahun 2004 tentang desa pemerintah desa adalah organisasi pemerintah desa yang terdiri atas kepala desa dan perangkat desa. Perangkat desa terdiri dari sekretaris desa dan perangkat desa lainnya. Perangkat desa lainnya terdiri atas sekretaris desa, pelaksanaan teknis lapangan, dan unsur kewilayahan.¹⁸

a. Unsur pimpinan, yaitu kepala desa

Kepala desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa, masa jabatannya ditetapkan selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya. Kepala desa dipilih langsung oleh penduduk desa. Seorang kepala desa haruslah seorang warga Negara republik Indonesia yang memenuhi syarat, yang selanjutnya akan ditentukan dalam perda tentang tata cara pemilihan kepala desa. Untuk desa-desa yang hak tradisional masih hidup dan diakui keberadaannya, pemilihan kepala desanya dilakukan berdasarkan ketentuan hukum adat setempat, yang ditetapkan dalam perda dengan berpedoman pada peraturan pemerintah.¹⁹ Kepala desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Dalam melaksanakan tugasnya, kepala desa mempunyai wewenang yaitu:²⁰

¹⁸Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, (Jakarta: PT Gelora Aksara Pratama, 2011), h. 73

¹⁹ Rosalih Abdullah, *pelaksanaan otonomi luas dengan pemilihan kepala daerah secara langsung*, (cet;III, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), h. 68-169

²⁰Hanif Nurcholis, *Op.cit.* 74

- 1) Memimpin penyelenggaraan pemerintah desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD;
- 2) Mengajukan rancangan peraturan desa;
- 3) Menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD;
- 4) Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APBDesa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD;
- 5) Membina kehidupan masyarakat desa;
- 6) Membina perekonomian desa;
- 7) Mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;
- 8) Mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- 9) Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya kepala desa mempunyai kewajiban yaitu:²¹

- 1) Memegang teguh dan mengamalkan pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 2) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- 3) Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- 4) Melaksanakan kehidupan demokrasi;

²¹ Hanif Nurcholis, *Op.cit*, h. 75

- 5) Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme;
 - 6) Menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan desa;
 - 7) Menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan;
 - 8) Menyenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik;
 - 9) Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa;
 - 10) Melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa;
 - 11) Mendamaikan perselisihan masyarakat di desa;
 - 12) Mengembangkan pendapatan masyarakat dan desa;
 - 13) Membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat;
 - 14) Memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa; dan
 - 15) Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup.
- b. Unsur pembantu kepala desa, yaitu terdiri atas:
- 1) Sekretariat desa, yaitu unsur staf atau pelayanan yang diketahui oleh sekretaris desa. Sekertaris desa yang sudah ada sebelum berlaku UU No. 32 tahun 2004 diisi oleh bukan pegawai negeri sipil, namun secara bertahap diangkat menjadi pegawai negeri sipil sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- 2) Unsur pelaksanaan teknis lapangan, yaitu unsur pembantu kepala desa yang melaksanakan urusan teknis di lapangan seperti urusan pengairan, keagamaan dan lain-lain;
- 3) Unsur kewilayahan, yaitu pembantu kepala desa di wilayah kerjanya seperti kepala dusun.

c. Badan Permusyawaratan Desa

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan suatu badan yang sebelumnya disebut badan perwakilan desa, yang berfungsi menetapkan peraturan desa, bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa yang bersangkutan, yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Wakil yang dimaksud dalam hal ini adalah penduduk desa yang memegang jabatan seperti ketua rukun warga, pemangku adat dan tokoh masyarakat lainnya.²²

d. Keuangan Desa

Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban dasar yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik desa, berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban yang dimaksud menimbulkan pendapatan, belanja dan pengelolaan desa.²³

²² Rokki, *Peran Pemerintah Desa dalam Pemberdayaan Petani Rumput Laut di Desa Burau Pantai*, Skripsi, (IAIN Palopo, 2016), h. 13

²³ Rosalih Abdullah, *Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*, (cet;III, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010),h.170-171

Menurut undang-undang nomor 32 tahun 2004 pengertian desa adalah sebagai berikut:²⁴

Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Jadi, dalam sebuah desa kesatuan masyarakat hukum yakni kepala desa yang sudah dipilih oleh masyarakat memiliki hak otonomi daerah untuk membangun wilayah dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakatnya dalam kepentingan bersama yang dilindungi oleh UU.

4. Pemberdayaan Masyarakat

a. Pengertian pemberdayaan masyarakat

Falsafah pemberdayaan masyarakat dapat dikatakan sebagai kerjasama dengan masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Pemberdayaan semakin populer dalam konteks pembangunan dan pengentasan kemiskinan yang terjadi pada saat ini. Konsep pemberdayaan yang diusung adalah untuk melihat yang tidak berdaya atau lemah (*powerless*).²⁵

Menurut Suharto (2006:59) pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan. Sebuah proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat

²⁴ Ahmad Suprastiyo, *Peran Kepala Desa*, dalam <http://www.unigoro.ac.id/> (di Akses, tgl/20/02/2019).

²⁵ Oos M. Anwas, *Pemberdayaan Masyarakat di Era Global*, (bandung: alfabeta, 2014) h. 48

kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, terutama individu-individu yang mengalami kemiskinan. Sedangkan sebagai sebuah tujuan pemberdayaan merujuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya. Pengertian pemberdayaan sebagai tujuan seringkali digunakan sebagai indikator sebuah keberhasilan pemberdayaan. Proses pemberdayaan dapat dilakukan secara individual maupun kolektif (kelompok).

b. Proses Pemberdayaan Masyarakat

Hakikat pemberdayaan masyarakat adalah untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam meningkatkan taraf hidupnya. Dalam proses tersebut masyarakat bersama-sama melakukan hal-hal berikut:²⁶

1. Mengidentifikasi dan mengkaji potensi wilayah, permasalahan, serta peluang-peluangnya. Kegiatan ini dimaksudkan agar masyarakat mampu dan percaya diri dalam mengidentifikasi serta menganalisa keadaannya, baik potensi maupun permasalahannya;
2. Menyusun rencana kegiatan kelompok berdasarkan hasil kajian;

²⁶Totok Mardikanto, *Pemberdayaan Masyarakat*, (Bandung: Alfabeta, CV, 2013) h. 125-126

3. Menerapkan rencana kegiatan kelompok;
4. Memantau proses dan hasil kegiatan secara terus menerus dan partisipatif.

c. Sosialisasi Pemberdayaan Masyarakat

Sosialisasi merupakan upaya mengkomunikasikan kegiatan untuk menciptakan dialog dengan masyarakat. Melalui sosialisasi akan membantu untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dan pihak terkait tentang program dan atau kegiatan pemberdayaan masyarakat yang telah direncanakan. Proses sosialisasi menjadi sangat penting, karena akan menentukan minat atau ketertarikan untuk berpartisipasi (berperan dan terlibat) dalam program pemberdayaan masyarakat yang dikomunikasikan.²⁷

d. Strategi pemberdayaan masyarakat

Pemberdayaan masyarakat adalah suatu kegiatan yang memiliki tujuan yang jelas dan harus dicapai. Oleh sebab itu, setiap pelaksanaan pemberdayaan masyarakat perlu dilandasi dengan strategi kerja tertentu demi keberhasilannya untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Dalam pengertian sehari-hari, strategi sering diartikan sebagai langkah-langkah atau tindakan tertentu yang dilaksanakan demi tercapainya suatu tujuan atau penerima manfaat yang dikehendaki.

Pemberdayaan masyarakat dalam pasal 1 ayat 8 permendagri RI Nomor 7 Tahun 2007 yaitu:²⁸ menyatakan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah suatu

²⁷ *Ibid*, Totok Mardikanto, h. 125

²⁸Peraturan Menteri dalam Negri, *Tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat dalam file:///C:/users/downloads/no.7.2007%20(3). Pdf* (Akses tgl 28 Februari 2019)

strategi yang digunakan dalam pembangunan masyarakat sebagai upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Secara konseptual, strategi pemberdayaan sering diartikan dengan beragam pendekatan yaitu:²⁹

1. Strategi sebagai suatu rencana

Strategi merupakan pedoman atau acuan yang dijadikan landasan pelaksanaan kegiatan, demi tercapainya tujuan-tujuan yang ditetapkan;

2. Strategi sebagai kegiatan

Strategi merupakan upaya-upaya yang dilakukan oleh setiap individu, untuk memenangkan persaingan, demi tercapainya tujuan yang diharapkan atau yang telah ditetapkan;

3. Strategi sebagai pola pikir

Strategi merupakan suatu tindakan yang dilandasi oleh wawasan pemikiran yang luas bagi setiap individu yang ingin memanfaatkan peluang dalam ekonomi sebagai upaya untuk meningkatkan strategi pemberdayaan bagi masyarakat;

4. Strategi sebagai suatu instrument

Strategi merupakan alat yang digunakan oleh semua unsur pimpinan organisasi/perusahaan, terutama menejer puncak, sebagai pedomen sekaligus alat pengendali pelaksanaan kegiatan;

²⁹Totok Mardikanto, *op.cit* , h. 167-168

5. Strategi sebagai suatu sistem

Strategi merupakan satu kesatuan rencana dan tindakan-tindakan yang komprehensif dan terpadu, yang diarahkan untuk menghadapi tantangan-tantangan guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

e. Tujuan Pemberdayaan Masyarakat

Tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan masyarakat adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri. Kemandirian tersebut meliputi kemandirian berfikir, bertindak, dan mengendalikan apa yang mereka lakukan tersebut. Kemandirian masyarakat merupakan suatu kondisi yang dialami masyarakat yang ditandai oleh kemampuan kognitif, konatif, psikomotorif, efektif, dengan pengarahan sumber daya yang dimiliki oleh lingkungan masyarakat tersebut.³⁰

5. Pertanian

Secara umum pertanian adalah suatu kegiatan manusia dalam memanfaatkan sumber daya hayati untuk dapat menghasilkan bahan pangan, sumber energi, bahan baku industri dan untuk mengelola lingkungannya. Adapun pengertian pertanian secara luas pertanian adalah pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan oleh manusia dengan cara menanam tanaman produktif yang dapat menghasilkan dan dipergunakan untuk kehidupan. Atau seluruh kegiatan yang mencakup pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, dan perikanan yang hasilnya dapat digunakan untuk kehidupan manusia.

³⁰M. Indra Maulana, *Peran Dana Desa dalam Memberdayakan Masyarakat Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam Studi Kasus di Desa Sinar Palembang Kec. Candi Puro Kab. Lampung Selatan*, Jurnal Ekonomi Islam, (UIN Raden Intan Lampung, 2018), h. 42

Aktivitas pertanian yang terdapat di Indonesia ada dua macam yaitu:

a. Pertanian lahan basah

Pertanian lahan basah merupakan pertanian yang digenangi air atau dikenal dengan sawah, pertanian ini banyak dilakukan di dataran rendah, biasanya berlokasi sekitar 300 m diatas permukaan laut. Karena di wilayah tersebut umumnya banyaknya sungai dan adanya irigasi untuk pengairannya.

b. Pertanian lahan kering

Berbeda dengan pertanian lahan basah pertanian lahan kering merupakan pertanian yang dilakukan pada daerah dengan tingkat cadangan air yang tidak terlalu banyak. Jenis tanaman pada lahan kering yaitu jagung, ubi-ubian kacang-kacangan dan lain-lain.

Adapun jenis pertanian yang terdapat di Indonesia yaitu:

a. Sawah

Sawah merupakan suatu bentuk pertanian yang dilakukan pada lahan basah dan membutuhkan banyak air. Adapun jenis sawah diantaranya:

- 1) Sawah irigasi adalah sawah yang mendapatkan air secara teratur sepanjang tahun. Sawah jenis irigasi mampu menghasilkan panen tiga kali dalam setahun.
- 2) Sawah tadah hujan adalah sawah yang memperoleh air hanya dari air hujan yang turun ke bumi.

- 3) Sawah bencah atau sawah pasang surut adalah sawah yang berada dekat dengan muara sungai atau di tepi pantai. Penanaman dilakukan pada saat air surut.
- 4) Sawah lebak adalah jenis sawah yang ditanami padi yang letaknya berada dipinggir sungai (kanan atau kiri sungai).

b. Perkebunan

Perkebunan merupakan suatu area yang ditanami tanaman perkebunan sebagai tanaman pokok. Berdasarkan pengusahaannya, perkebunan ada dua macam yaitu perkebunan besar dan perkebunan rakyat. Perkebunan besar merupakan usaha yang dilakukan dalam skala besar dan tidak diusahakan secara individual. Sedangkan perkebunan rakyat merupakan usaha perkebunan yang dilakukan masyarakat dalam skala kecil.

c. Ladang

Ladang merupakan kegiatan pertanian yang dilakukan pada lahan yang kering dengan membuka hutan. Dimana setelah beberapa kali ditanami lahan ini ditinggalkan jika tanahnya sudah tidak subur lagi dan berpindah ke lahan lain yang memiliki tanah masih subur.³¹

6. Peran Pemerintah

Pemerintahan memiliki peranan dan fungsi di berbagai bidang untuk melaksanakan roda pemerintahan dengan baik dan benar, oleh karena itu pemerintah

³¹ Ikapratiwi, *Pengertian dan Jenis Pertanian*, <http://portalbelajar.com/2015/09/pengertian-dan-jenis-pertanian.html>, diakses tgl 09/03/2019.

sangat penting bagi masyarakat dan merupakan salah satu unsur terbentuknya Negara. Tanpa pemerintahan Negara tidak akan lengkap dan tidak bisa dikatakan Negara. Adapun peranan pemerintah yaitu:³²

a. Fungsi pelayanan

Fungsi utama pemerintah adalah memberikan pelayanan terbaik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat disemua sektor.

b. Fungsi pengaturan

Pemerintah memiliki fungsi pengaturan (*regulating*) untuk mengatur seluruh sektor dengan kebijakan-kebijakan dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah dan peraturan lainnya.

c. Fungsi pembangunan

Fungsi pembangunan dijalankan apabila kondisi masyarakat melemah dan pembangunan akan dikontrol ketika kondisi masyarakat membaik (menuju taraf yang lebih sejahtera).

d. Fungsi pemberdayaan

Fungsi ini dijalankan jika masyarakat tidak mempunyai skill dan kemampuan untuk bisa keluar dari zona nyaman (*comfort zone*).

Fungsi pemerintah dalam kaitannya dengan pemberdayaan yaitu mengarahkan masyarakat kemandirian dan pembangunan demi terciptanya kemakmuran, tidak serta merta dibebankan kepada masyarakat. Perlu adanya peran pemerintah secara optimal

³² Anonim, *Apa itu Pemerintahan dan Pentingnya Pemerintahan*
<http://ziaulmuhammad.blogspot.co.id/2016/02/apa-itu-pemerintahan-dan-pentingnya.html>, diakses tgl 09/03/2019.

dan mendalam untuk membangun masyarakat, maka peran pemerintah yang dimaksud yaitu:

1. Pemerintah sebagai regulator

Peran pemerintah sebagai regulator adalah menyiapkan arah untuk menyeimbangkan penyelenggaraan pembangunan melalui penerbitan peraturan-peraturan.

2. Pemerintah sebagai dinamisator

Peran pemerintah sebagai dinamisator adalah menggerakkan partisipasi masyarakat jika terjadi kendala-kendala dalam proses pembangunan untuk mendorong dan memelihara dinamika pembangunan daerah.

3. Pemerintah sebagai fasilitator

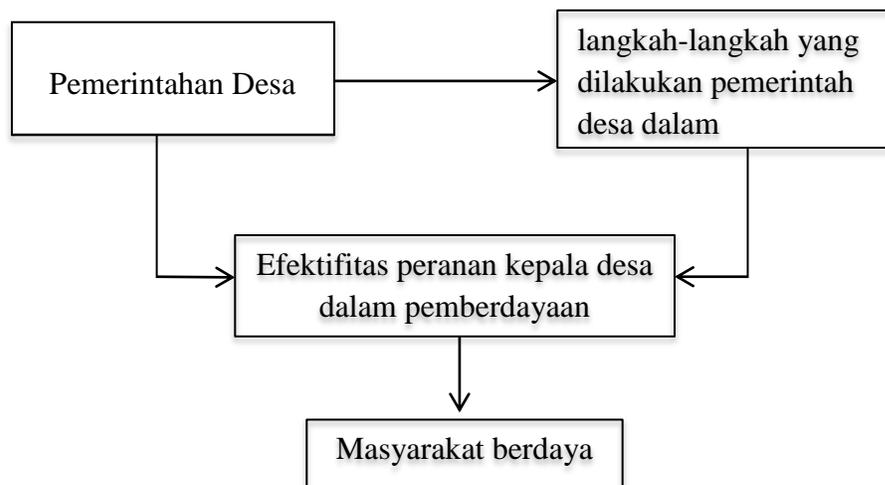
Peran pemerintah sebagai fasilitator adalah menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan untuk menjembatani berbagai kepentingan masyarakat dalam mengoptimalkan pembangunan daerah.

C. Kerangka Pikir

Pemberdayaan ekonomi pedesaan merupakan suatu usaha dari pemerintah setempat untuk memperbaiki dan meningkatkan taraf hidup serta kondisi sosial masyarakat sehingga tercapainya kesejahteraan rakyat karena pada hakikatnya sebagai seorang pemimpin sudah menjadi sebuah tanggungjawab yang harus dilaksanakan. Dengan adanya usaha dari pemerintah masyarakat akan merasa mudah untuk diberdayakan .

Pada sisi lain pemberdayaan ekonomi masyarakat bukan sekedar memberdayakan ekonomi masyarakat dengan berbagai masalah ekonomi sosial, ekonomi, politik, budaya, dan hukum, tetapi jauh lebih luas yaitu membangun sikap mental masyarakat yang bermakna sama dengan membangun manusianya secara keseluruhan bukan sekedar kebutuhan jasmaninya, tetapi juga kebutuhan psikisnya (mental) dan kebutuhan spritualnya (rohani) inilah yang menjadi target utama.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka penulis akan mencoba memberikan gambaran kerangka pikir yang dapat menghantarkan dalam pembahasan yang telah ditentukan. Kerangka pikir akan disajikan dalam bentuk diagram sebagai berikut:



Gambar 3.1 Kerangka fikir

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah suatu cara yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian untuk mendapatkan informasi dan hasil yang sesuai, dalam hal ini termasuk tahapan penelitian. Dalam hal ini dapat dijelaskan metode yang digunakan dalam penelitian peran pemerintah desa dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat di desa Lumbewe maka penulis melakukan penelitian berdasarkan metode yang dijalankan. Adapun metode penelitian yang digunakan sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian langsung pada lapangan / *field research* yaitu dengan mencari data – data yang langsung dari sumber di Desa Lumbewe. Penelitian lapangan dilakukan untuk mendapatkan data yang akurat dari sumber – sumber yang ada di lokasi penelitian yang berhubungan dengan masalah peran pemerintah terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat. Jenis penelitian lain yang digunakan yaitu penelitian pustaka / *library research* yang bertujuan untuk mencari data – data yang bersumber dari buku, jurnal maupun penelitian terdahulu untuk dijadikan bahan pendukung penelitian ini.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yaitu penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dalam pengambilan informasi agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. Penelitian ini memiliki sifat

mendekripsikan suatu masalah dengan mencari sumber permasalahannya kemudian dianalisis sehingga penelitian ini memiliki data yang akurat untuk menyimpulkan hasil dari penelitian ini.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan sosiologis dan empiris. Pendekatan sosiologis yaitu suatu pendekatan yang mengkaji sebuah studi atau penelitian untuk mempelajari hidup bersama dalam masyarakat serta hubungan ikatan masyarakat dengan pemimpinnya. Sedangkan pendekatan empiris yaitu usaha untuk mendekati masalah yang diteliti sesuai dengan kenyataan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat.

4. Sumber Data

Untuk mengumpulkan data yang didapat dalam penelitian ini penulis menggunakan data primer dengan data sekunder. Data primer dengan data sekunder dapat dijelaskan seperti berikut:

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang langsung diperoleh dari narasumber atau objek yang diteliti, dalam hal ini objeknya adalah pemerintah desa dan masyarakat. Sumber data primer dalam penelitian ini merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari Kantor Desa Lumbewe dan masyarakat di Desa Lumbewe. Hasil sumber data yang didapatkan baik melalui wawancara maupun data mentah dari Pemerintah Desa tersebut kemudian diolah untuk disajikan menjadi data yang sesuai dengan penelitian ini.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari orang – orang yang telah melakukan penelitian terdahulu atau sumber – sumber sebelumnya yang telah ada. Sumber ini diperoleh dari buku – buku, lembaga / instansi, data Pemerintahan Desa dan data – data lain yang terkait dengan penelitian.

5. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan wilayah dimana peneliti akan melakukan pengamatan, dan pengambilan data untuk menggali informasi terkait dengan penelitian. Adapun lokasi penelitian ini dilakukan di pemerintahan desa Lumbewe, Kecamatan Burau, dinas pertanian dan perkebunan Luwu Timur.

6. Subjek atau Informan Penelitian

Subjek atau informan penelitian adalah semua pihak yang dijadikan sumber untuk memperoleh data dalam sebuah penelitian. Dalam penelitian ini pihak yang dijadikan informan adalah yang dianggap mempunyai informasi yang dibutuhkan diwilayah penelitian. Menurut peneliti subjek atau informan dalam penelitian ini yaitu:

a. Pemerintah Desa dalam hal ini kepala desa Lumbewe. Wawancara dilakukan kepada kepala desa Lumbewe dengan tujuan untuk memperoleh informasi mengenai Desa Lumbewe, siapa saja pengurus atau perangkat desa beserta tugas dan wewenangnya, apa saja upaya-upaya yang dilakukan Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat dalam bidang ekonomi, serta apa saja kendala yang dihadapi dalam upaya pemberdayaan masyarakat di Desa Lumbewe.

- b. Tokoh-tokoh Masyarakat. Wawancara dilakukan kepada tokoh-tokoh masyarakat Desa Lumbewe dengan maksud untuk mendapatkan informasi tentang sejauh mana peran Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakatnya dalam bidang ekonomi.
- c. Masyarakat. Wawancara dilakukan kepada beberapa masyarakat Lumbewe dengan tujuan untuk mendapatkan informasi mengenai apakah peran pemerintah dalam memberdayakan masyarakatnya sudah berhasil atau tidak untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat.

7. Metode Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang diperoleh dalam penelitian ini maka penulis menggunakan metode sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi merupakan metode pengumpulan data dengan mengunjungi serta mengamati objek langsung di tempat penelitian. Metode observasi ini dilakukan di awal penelitian sampai akhir untuk mencari data langsung yang terjadi dilapangan dan membandingkan dengan data yang sudah ada sebelumnya. Dengan menggunakan metode observasi ini, peneliti dapat mengamati titik – titik permasalahan dengan mengumpulkan data dari setiap objek yang diobservasi.

b. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan cara tanya jawab dengan terperinci dengan dasar permasalahan yang terjadi, tujuan penelitian dan hasil perkiraan sementara peneliti. Dalam metode wawancara ini akan diajukan kepada pihak Pemerintahan Desa Lumbewe, masyarakat Desa Lumbewe dan lembaga –

lembaga lain yang bersangkutan dengan penelitian ini guna mendapatkan informasi yang akurat dan merata.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang bersumber dari dokumen – dokumen seperti arsip Pemerintahan Desa Lumbewe, buku – buku, hasil notulen dan gambar – gambar yang ada di tempat penelitian. Dokumentasi ini berisi tentang profil, struktur kepengurusan, data pelayanan masyarakat dan data mengenai lembaga – lembaga yang berhubungan dengan peran pemerintah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

8. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data merupakan proses yang mengartikan data-data yang telah diperoleh di lapangan yang sesuai dengan penelitian. Metode pengolahan data dalam penelitian ini yaitu:

a. *Editing*

Editing merupakan metode yang digunakan dalam pemeriksaan kembali suatu informasi seperti buku, dokumen, dan catatan-catatan lainnya. Dalam penelitian ini proses *editing* yang dilakukan yaitu melengkapi data yang masih kurang, membuang dan mengedit data yang dirasa tidak relevan serta tidak cocok dengan pokok bahasan penelitian, dan pemeriksaan per kalimat, paragraf setiap pemakaian kata dan bahasa yang kurang tepat.

b. *Organizing*

Organizing merupakan pengaturan kembali data-data yang diperoleh secara acak untuk nantinya disusun dan menghasilkan data akurat untuk menjadi bahan penyusunan skripsi. Dalam penelitian ini proses *organizing* yang dilakukan yaitu mengatur penyusunan penelitian agar sesuai dengan sistematika format proposal skripsi mulai dari bab 1 sampai dengan bab VI.

9. Analisis Data

Analisis data merupakan teknik yang digunakan untuk mencerna, menelaah data-data yang telah didapatkan dengan perbandingan informasi yang telah didapatkan melalui jurnal, buku, dan penelitian terdahulu agar penelitian ini dapat terus terstandarisasi.

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan suatu proses pemilihan atau penyaringan informasi-informasi pokok yang dibutuhkan dalam penelitian. Proses reduksi data dalam penelitian ini yaitu semua data yang diperoleh di lapangan diperiksa kembali, dipilah, dikelompokkan, disederhanakan serta membuang data yang tidak perlu sehingga hasil akhirnya dapat ditarik kesimpulan. Dalam hal ini, peneliti mengkategorikan data kedalam beberapa bagian yaitu peran pemerintah desa dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Peneliti memilih dan memilah data-data yang relevan dengan tema penelitian.

b. Penyajian data

Penyajian data merupakan suatu rangkaian informasi yang menghasilkan penarikan keputusan sesuai dengan tema atau pokok-pokok permasalahan. Penyajian

data haruslah tersusun dengan rapi dan sistematis agar informasi tersebut dapat dibaca. Proses penyajian data dalam penelitian ini yaitu sebelum data disajikan dari segi kerapian, tulisan, urutan bab, halaman dan sebagainya disesuaikan dengan standar penyusunan skripsi serta semua data yang diperoleh dikelompokkan dan disesuaikan dengan tema atau pokok-pokok permasalahan penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan penyajian data dalam bentuk laporan narasi dan tabel dari data-data yang sudah direduksi.

c. Penarikan Kesimpulan

Merupakan tindakan yang dilakukan penulis untuk melakukan tindakan baru sesuai dengan analisis data yang telah didapatkan. Proses penarikan kesimpulan dalam penelitian ini yaitu setelah semua tahapan dilakukan peneliti menyimpulkan hasil penelitian dari apa yang didapat di lapangan dan memberikan solusi setiap pokok permasalahan penelitian serta saran sebagai bagian akhir dari sebuah penelitian.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Sejarah Singkat Desa Lumbewe

Pada awal periode sebelum tahun 1945 wilayah Lumbewe merupakan salah satu wilayah yang dihuni oleh sekelompok masyarakat yang dipimpin oleh seorang pemimpin yang bergelar Balailo. Masa ini berlangsung selama ± 2 (dua) generasi yakni Balailo Lumbewe I dan II. Pada saat kepemimpinan Balailo II (sekitar tahun 1.870an) dibangunlah “Benteng Bambalu” yang terletak di sekitar wilayah Bambalu tua (sebelah selatan Dusun Tembo’e Desa Burau). Pada saat pembangunan benteng ini terjadi kesalahpahaman antara Balailo II dengan salah seorang saudaranya yang bernama Maruengin atau dikenal dengan nama Ambe Ma’a yang bergelar sebagai Balailo III.

Sejak proklamasi kemerdekaan RI 17 Agustus 1945, kondisi wilayah ini cukup aman sampai pada masa pergolakan beberapa kelompok masyarakat yang terbentuk dalam beberapa kesatuan bersenjata seperti DI-TII, Permesta, GPST dan lain-lain. Oleh karena seringnya terjadi kontak senjata antara beberapa kelompok tersebut dengan TNI, maka untuk keselamatan jiwa, masyarakat yang ada di wilayah ini mengasingkan diri ke hutan dan hidup secara berkelompok. Sekitar tahun 1961 keamanan di daerah ini mulai kondusif dan masyarakat kembali menata kehidupan di daerah ini dan pada akhir tahun 1962 terbentuklah pemerintahan desa yang disebut

dengan pemerintahan gaya baru (SOB) di Desa Lumbewe dan yang menjadi kepala desanya yaitu Elius Tereke. Pada tahun 1967 dibentuklah nama desa Jalajja yang wilayahnya meliputi wilayah Lumbewe. Pada tahun 1963 dimekarkanlah Desa Lumbewe dari Desa Jalajja dengan surat keputusan Bupati Luwu Nomor 360/IV/1993 yang ditandatangani Bupati Luwu MD.Djampu dengan status “desa persiapan” dan yang menjadi kepala desa yaitu H. Baso Opu To Cinde yang dibagi menjadi 3 (tiga) dusun yaitu Dusun Lumbewe, Dusun Bambalu dan Dusun Paobali. Pada tahun 1997 Desa Lumbewe sebagai desa persiapan berubah menjadi Desa Definitif dan ditunjuk H. Baso Opu To Cinde sebagai pelaksana kepala desa. Pada tahun 2001 dilakukan pemilihan kepala desa untuk pertama kalinya di Desa Lumbewe dan yang terpilih sebagai kepala desa yaitu H. Baso Opu To Cinde dengan masa jabatan 8 tahun (2001-2009). Tahun 2009-2013 yang menjadi kepala desa Nahrin dan tahun 2014-2019 yang menjadi kepala desa HM. Bintang Aras.³³

2. Letak Desa Lumbewe Kec. Burau Kab. Luwu Timur

Desa Lumbewe merupakan salah satu desa yang terletak di wilayah sebelah timur kecamatan Burau kabupaten Luwu Timur yang terbagi atas 3 (tiga) dusun yaitu Dusun Lumbewe, Dusun Bambalu dan Dusun Paobali dengan batas-batas wilayah desa sebagai berikut:

- 1) Sebelah utara berbatasan dengan Desa Jalajja
- 2) Sebelah timur berbatasan dengan Desa Burau

³³ Muhammad Bintang Andi Aras, “Kepala Desa Lumbewe Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur, Wawancara.” 29 Juli 2019.

- 3) Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Burau Pantai
- 4) Sebelah barat berbatasan dengan Desa Batu Putih³⁴

Luas wilayah Desa Lumbewe sekitar 692,25 Ha yang terdiri dari area persawahan, perkebunan, perhutanan, pemukiman penduduk, lahan pangan, tanah yang sementara tidak diusahakan, lain-lain untuk kepentingan umum dan bangunan.

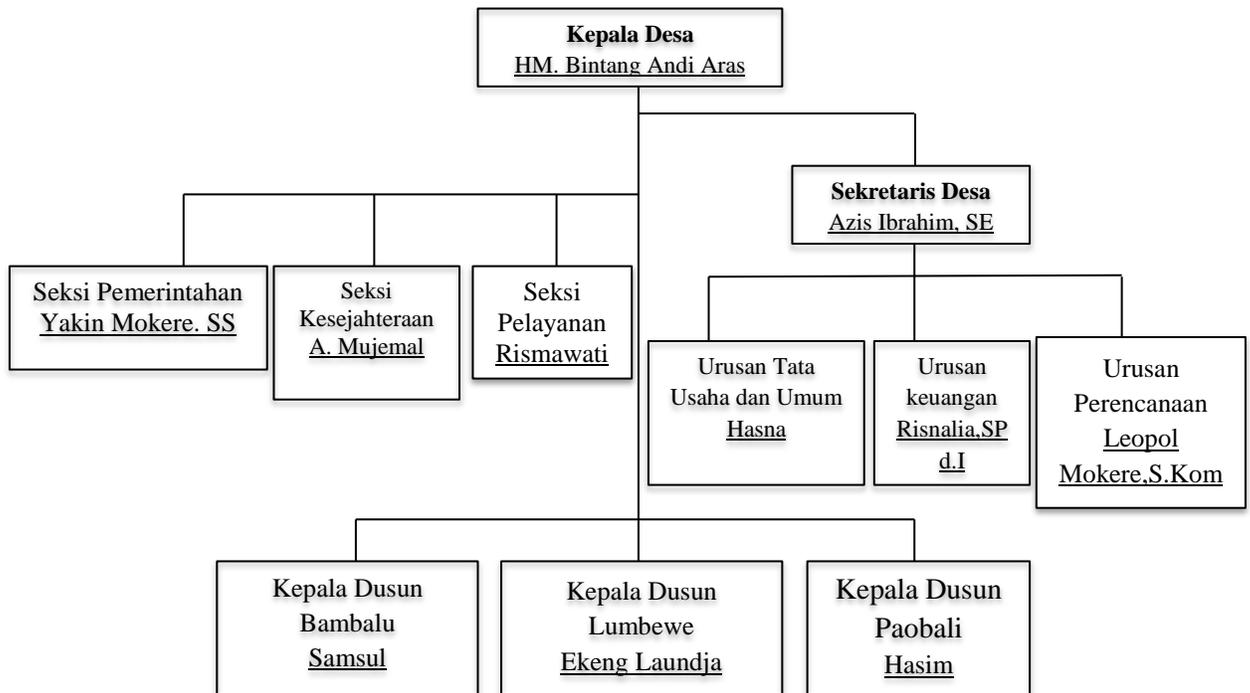
3. Jumlah Penduduk Desa Lumbewe Kec. Burau Kab. Luwu Timur

Penduduk Desa Lumbewe terdiri atas 605 kepala keluarga dengan jumlah penduduk 2.704 jiwa dengan rincian jumlah laki-laki 1.360 jiwa dan perempuan 1.344 jiwa. Penduduk Desa Lumbewe dalam memenuhi kebutuhan hidupnya melakukan berbagai macam pekerjaan seperti bertani, berwirausaha, karyawan dan ada juga yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS). Sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani. Persentase mata pencaharian penduduk Desa lumbewe yaitu dalam bertani 94,5%, wirausaha 1,3%, Pegawai Negeri Sipil (PNS) 1,7% dan karyawan 2,5%. Adapun tentang aspek agama, mayoritas penduduk di Desa Lumbewe beragama islam.³⁵

³⁴Ependi Liku Ara, “*Monografi Desa: Wilayah Kerja Penyuluhan Pertanian Desa Lumbewe Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur*”, 2018, h.1

³⁵Ependi Liku Ara, “*Monografi Desa: Wilayah Kerja Penyuluhan Pertanian Desa Lumbewe Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur*.”

4. Struktur Organisasi Pemerintah Desa Lumbewe Kec. Burau Kab. Luwu Timur



Gambar 4.1 Struktur Desa

Di Desa Lumbewe Kec. Burau Kab. Luwu Timur mayoritas masyarakatnya bekerja sebagai petani. Jumlah masyarakat yang bekerja sebagai petani di Desa Lumbewe dari ke tiga dusun (Lumbewe, Bambalu, dan Paobali) berjumlah 1094 jiwa dimana jumlah kepala keluarga petani setiap dusun yaitu Dusun Lumbewe berjumlah 190 Kepala Keluarga dengan total warganya 577 jiwa, Dusun Bambalu berjumlah 75 Kepala Keluarga dengan total warganya 324 jiwa, dan Dusun Paobali berjumlah 73

Kepala Keluarga dengan total warganya 193 jiwa.³⁶ Dalam bidang pertanian penduduk bercocok tanam seperti padi, jagung, coklat, kelapa sawit, dan lain-lain. Adapun luas lahan pertanian yang produktif terdiri dari lahan untuk bertani padi di sawah dan lahan untuk perkebunan. Luas lahan untuk sawah sekitar 305 Ha dan luas lahan perkebunan sekitar 464 Ha. Walaupun lahan perkebunan lebih luas, namun penduduk lebih banyak memilih bercocok tanam padi dibandingkan dengan memilih berkebun dikarenakan mahalnya kebutuhan pangan seperti bahan makanan pokok yaitu beras sehingga dengan bertani padi masyarakat bisa memenuhi kebutuhan pangannya tanpa harus membeli lagi. Dengan banyaknya lahan pertanian yang produktif masyarakat semakin ingin untuk bekerja mengolah lahan yang ada, namun yang menjadi kendala adalah cara yang digunakan para petani dalam mengolah lahan masih sangat kurang, para petani hanya mengandalkan pengalaman yang mereka lakukan dari dulu sehingga hasil panen yang masyarakat terima tidak maksimal. Oleh karena itu, dalam meningkatkan potensi yang ada di Desa Lumbewe baik itu potensi sumber daya alam maupun sumber daya manusianya keberadaan pemerintah sangat diperlukan.³⁷

³⁶Ependi Liku Ara, "*Monografi Desa: Wilayah Kerja Penyuluhan Pertanian Desa Lumbewe Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur*"

³⁷Abdul Latif, *Masyarakat, Wawancara*, 1 Agustus 2019.

B. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Upaya yang dilakukan pemerintah Desa Lumbewe dalam meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat

Adapun yang dilakukan pemerintah desa Lumbewe dalam upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat di Desa Lumbewe yaitu:

- a. Pengembangan lahan

Tabel 4.1 Luas lahan menurut kegunaannya

Lahan dan penggunaannya	Luas Lahan (Ha)
Sawah	305 Ha
Perkebunan	464 Ha
Kehutanan	88,5 Ha
Pekarangan dan Pemukiman	67,25 Ha
Pangan	28,5 Ha
Tanah yang sementara tidak diusahakan	24 Ha
Lain-lain untuk kepentingan umum dan bangunan	10 Ha
Jumlah	692,25 Ha

Lahan yang ada di Desa Lumbewe terdiri dari sawah, perkebunan, hutan, pekarangan, lain-lain untuk kepentingan umum dan bangunan. Untuk lahan pertanian

yang ada di Desa Lumbewe terdiri dari lahan perkebunan dan lahan untuk sawah dimana lahan perkebunan lebih luas dari lahan persawahan. Luas lahan untuk perkebunan sekitar 464 Ha, sedangkan luas lahan persawahan sekitar 305 Ha. Karena lahan perkebunan lebih luas dari lahan persawahan, banyak masyarakat Lumbewe yang tidak menggarap lahan. Dalam upaya pengembangan lahan, Pemerintah Desa memiliki program – program yang menunjang peningkatan ekonomi masyarakat. Program desa yang pertama yaitu pengalihan lahan perkebunan ke lahan persawahan. Dengan dilakukannya pengalihan lahan tersebut Pemerintah Desa mendapatkan 2 keuntungan, yaitu yang pertama pengelola lahan pertanian semakin banyak karena rata – rata masyarakat lebih banyak memilih bekerja di sawah dari pada kebun. Dengan bertambahnya lahan persawahan maka akan menyerap lebih banyak lagi tenaga kerja untuk menjadi petani di sawah. Yang ke dua, Pemerintah Desa dapat menyalurkan bantuan infrastruktur seperti sarana pertanian, pengairan, jalan, dan pelatihan kelompok tani secara menyeluruh.³⁸

b. Pemberdayaan PKK

Program Desa yang ke-2 yaitu pemberdayaan PKK yang selama ini sudah berjalan dengan baik. Pemberdayaan PKK yang dimaksudkan yaitu dengan memaksimalkan hasil pertanian yang kemudian dari pemanfaatan hasil pertanian tersebut dapat diolah menjadi suatu produk. Dengan pemberdayaan PKK yang lebih meluas mengakibatkan hasil pengolahan hasil bumi menjadi meningkat, tenaga kerja

³⁸ Muhammad Bintang Andi Aras, “Kepala Desa Lumbewe Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur, Wawancara.” 29 Juli 2019.

semakin banyak, dan jenis olahan akan semakin beragam. Dengan demikian, ekonomi warga juga akan terbantu dari hasil penjualan produk. Untuk saat ini hasil olahan dari PKK yaitu produk – produk seperti olahan pisang, olahan rumput laut dan olahan durian.³⁹

c. Peningkatan Infrastruktur

Perkembangan ekonomi masyarakat tidak luput dari peran pemerintah dalam penyediaan infrastruktur. Peningkatan – peningkatan ini dapat dilihat dari banyaknya infrastruktur yang dibangun seperti pembangunan jalan, perbaikan irigasi, pengadaan mesin – mesin pertanian. Dengan diadakannya peningkatan infrastruktur, petani dapat merasakan kemudahan akses ke lokasi pertanian, dapat mempercepat pengolahan tanah pertanian, kemudahan dalam mendapatkan pasokan air, dan kemudahan panen yang semuanya dilakukan oleh mesin.⁴⁰

d. Penyuluhan dan Pelatihan

Upaya pemerintah desa dalam meningkatkan ekonomi yaitu dengan pengadaan penyuluhan dan pelatihan. Penyuluhan yang telah dilakukan seperti pengenalan tentang bibit, jenis obat – obatan, jenis pupuk. Sedangkan pelatihan yaitu pelatihan tentang cara bercocok tanam, pelatihan tentang pemberian obat dan pupuk. Dengan pelatihan yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam hal ini dibantu oleh

³⁹ Muhammad Bintang Andi Aras, “Kepala Desa Lumbewe Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur, Wawancara.” 29 Juli 2019.

⁴⁰ Muhammad Bintang Andi Aras, “Kepala Desa Lumbewe Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur, Wawancara.” 29 Juli 2019.

BPP dapat membantu petani dalam melakukan pekerjaannya dengan lebih profesional dan terlatih. Menurut Kepala Desa Lumbewe, banyak petani – petani yang belum faham tentang cara bertani yang baik dan benar. Mereka hanya mengikuti pendahulu – pendahulunya dalam bercocok tanam, sedangkan ilmu pertanian makin hari makin berkembang dan makin banyak pula cara penanganannya. Dengan penyuluhan dan pelatihan ini diharapkan kedepannya petani dapat menghasilkan panen yang baik dan ilmu yang diperoleh dapat menjadi dasar dalam bercocok tanam.⁴¹

2. Langkah yang dilakukan pemerintah desa dalam memberdayakan ekonomi masyarakat di desa Lumbewe Kecamatan Burau

1. Pelatihan dan Pembelajaran

Pelatihan dan pembelajaran ini dimaksudkan untuk membentuk masyarakat yang mayoritas petani untuk siap dalam menghadapi masalah – masalah pertanian sehingga hasil panen akan maksimal. Dalam hal ini juga Pemerintah Desa memberikan pembelajaran kepada masyarakat bukan hanya dalam sektor pertanian saja, pemerintah desa juga memberikan pengajaran kepada masyarakat yang ingin berwirausaha ataupun pengadaan pelatihan *skill* seperti pelatihan menjahit.

2. Penyediaan Infrastruktur

Infrastruktur dalam hubungannya dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah untuk menunjang kelancaran proses dari awal penanaman seperti pemberian

⁴¹Ependi Liku Ara, Ketua Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Desa Lumbewe Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur, Wawancara, 30 Juli 2019.

obat – obatan, pemberian pupuk, irigasi, alat – alat pertanian hingga panen. Dengan penunjang yang sudah baik maka pendapatan dan kepraktisannya lebih baik lagi. Sebagai perbandingan pada tahun 2011 saat jalan masih belum terbentuk, petani kesulitan dalam bercocok tanam mengingat medan yang dilalui kendaraan masih sangat minim. Selain itu saat panen tiba, hasil panen sulit dikeluarkan sehingga petani harus membayar pekerja untuk membantu mengangkat hasil panennya.⁴²

3. Penyediaan Fasilitas Kelompok Tani

Kelompok tani merupakan lembaga yang terdiri dari para petani yang telah terdaftar sebagai petani pada daerah tertentu. Dalam kelompok tani ini pemerintah memberikan bantuan subsidi berupa obat – obatan, pupuk dan penyediaan bibit unggul. Dengan adanya bantuan ini sangat membantu masyarakat yang terdaftar sebagai kelompok tani tersebut karena harga pupuk, obat – obatan dan bibit lebih murah jika dibandingkan dengan pembelian pupuk secara bebas dipasaran.⁴³

3. Kendala yang terjadi dalam proses pemberdayaan masyarakat di desa Lumbewe Kec. Burau

1. Kurangnya keahlian yang dimiliki petani

Pengetahuan tentang bercocok tanam di Desa Lumbewe pada umumnya didapat dari pengajaran turun – temurun oleh keluarga atau dari pemilik lahan ke

⁴²Muhammad Bintang Andi Aras, “Kepala Desa Lumbewe Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur, Wawancara.” 29 Juli 2019.

⁴³Muhammad Bintang Andi Aras, “Kepala Desa Lumbewe Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur, Wawancara.” 29 Juli 2019.

pekerjanya. Dengan bertambahnya masalah dan banyaknya jenis penyakit sudah pasti dibutuhkan juga pengetahuan yang lebih baik lagi agar petani dapat beradaptasi dengan baik. Kurangnya *skill* yang dimiliki petani saat ini mengakibatkan hasil panen tidak mencapai target, hal ini juga berdampak pada peningkatan perekonomian masyarakat. Kendala utama dari desa dalam mengatasi masalah seperti ini adalah mengumpulkan petani untuk kemudian diadakan pelatihan. Dalam hal ini petani enggan mengikuti pelatihan dan memilih untuk melakukan pekerjaan seperti biasanya.⁴⁴

2. Kurangnya pemahaman bantuan desa kepada masyarakat

Bantuan yang desa berikan kepada masyarakat sebenarnya sudah sangat banyak namun masyarakat memiliki pemahaman yang kurang tepat dalam pengertian bantuan desa tersebut. Menurut masyarakat, bantuan dari desa itu merupakan bantuan yang sifatnya dapat dimiliki secara gratis dan merupakan hak mereka untuk mendapatkannya. Namun dalam kenyataannya Pemerintah Desa melakukan bantuan tidak semuanya gratis, contoh saja bantuan desa dalam penyediaan pupuk dan obat – obatan yang didistribusikan melalui kelompok tani, bantuan infrastruktur seperti irigasi, alat – alat pembajak sawah sampai mesin panen padi. Kurangnya pemahaman

⁴⁴Muhammad Bintang Andi Aras, “Kepala Desa Lumbewe Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur, Wawancara.” 29 Juli 2019.

tentang bantuan desa inilah yang mengakibatkan masyarakat merasa tidak terbantu padahal bantuan dari desa sudah dinikmati oleh masyarakat desa.⁴⁵

3. Pinjaman macet

Selain bantuan berupa infrastruktur, Pemerintah Desa juga memiliki program pinjaman kepada masyarakat yang ingin membuka usaha. Pinjaman ini berupa pinjaman berjangka dan tanpa bunga. Dengan adanya pinjaman yang ringan ini mengakibatkan banyaknya masyarakat yang ingin meminta bantuan dari desa. Dengan banyaknya pemohon, maka dilakukanlah seleksi yang mengakibatkan dari sekian banyaknya pemohon hanya beberapa saja yang dapat dibantu usahanya. Kendala yang dihadapi oleh desa muncul setelah para peminjam modal tersebut tidak mengembalikan pinjaman atau pinjaman macet. Akibat dari tidak baiknya aliran modal mengakibatkan desa mengalami kerugian karena tidak maksimalnya bantuan desa secara merata.⁴⁶

⁴⁵Muhammad Bintang Andi Aras, “Kepala Desa Lumbewe Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur, Wawancara.” 29 Juli 2019.

⁴⁶Muhammad Bintang Andi Aras, “Kepala Desa Lumbewe Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur, Wawancara.” 29 Juli 2019.

BAB V

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di desa Lumbewe Kecamatan Burau, maka didapatkan hasil berupa kesimpulan dan beberapa saran yang diharapkan kedepannya penelitian ini dapat dijadikan acuan.

A. Kesimpulan

1. Pada umumnya masyarakat di desa lumbewe kecamatan burau bekerja pada sektor pertanian. Peran pemerintah dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat yang umumnya petani ini adalah dengan mengadakan pelatihan dan pembelajaran tentang bagaimana cara bertani yang baik dan benar serta diberi pengajaran tentang pengetahuan – pengetahuan baru di dunia pertanian. Selain pemberian pelajaran, desa juga memberikan infrastruktur berupa pengadaan irigasi, jalan, alat – alat pertanian dan penyediaan kebutuhan – kebutuhan pertanian.

2. Pemerintah desa melakukan pemberdayaan warganya untuk memanfaatkan hasil bumi di desa lumbewe dengan mengolah bahan baku menjadi bahan jadi. Program pemerintah desa ini disalurkan melalui pembentukan kelompok PKK. Dengan adanya program PKK ini, pemerintah desa selain dapat memberdayakan warganya juga dapat memperbaiki perekonomian sekaligus dapat menyerap tenaga kerja.

3. Pengalihan lahan dari perkebunan ke lahan pertanian dilakukan secara berangsur – angsur sampai priode kepemimpinan selesai.

B. Saran

1. Pemerintah desa dalam proses pemerataan kurang memperhatikan daerah – daerah yang jauh dari pusat desa. Akibatnya lahan perkebunan yang masih luas tersebut tidak mendapat bantuan baik berupa infrastruktur maupun berbentuk obat – obatan/ pupuk. Disarankan untuk melihat kembali potensi desa secara menyeluruh agar hasil bumi desa Lumbewe dapat maksimal

2. Pelatihan dan penyuluhan jarang sekali dilakukan. Hal tersebut dikarenakan kurangnya himbauan dari desa yang menginformasikan tentang adanya pelatihan ataupun akan diadakannya penyuluhan. Selain kurangnya himbauan, pemerintah desa juga kurang serius dalam memberikan pelatihan yang berdampak warga menjadi enggan untuk mengikuti pelatihan lebih lanjut. Sarannya pemerintah desa harus melakukan penyuluhan secara merata dan dibuatkan program khusus atau forum yang dimaksudkan sebagai media bertukar informasi antar petani agar proses pembelajaran berjalan baik dan merata.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qu'ran Tajwid dan Terjemahnya.

Anonim, *Apa itu Pemerintahan dan Pentingnya Pemerintahan*

<http://ziaulmuhammad.blogspot.co.id/2016/02/apa-itu-pemerintahan-dan-pentingnya.html>, diakses tgl 09/03/2019.

Anwas Oos , *Pemberdayaan Masyarakat di Era Global*, (bandung: alfabeta, 2014)

Ash Shadr Muhammad Baqir, *Buku Induk Ekonomi Islam Iqtishaduna*, (Jakarta Zahra, 2008)

Ara Liku Ependi. 2018. Monografi Desa: Wilayah Kerja Penyuluhan Pertanian Desa Lumbewe Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur.

Fadillah Muhammad Hafid, *Strategi Pemerintah Dalam Upaya Meningkatkan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Di Kecamatan Bara Kota Palopo*, Skripsi (Palopo:Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri PALOPO, 2016).

Ikapратиwi,*PengertiandanJenisPertanian*,<http://portalbelajar.com/2015/09/pengertian-dan-jenis-pertanian.html>, diakses tgl 09/03/2019.

Mardikanto Totok, *Pemberdayaan Masyarakat*, (Bandung:Alfabeta, CV, 2013)

Maulana M. Indra, *Peran Dana Desa dalam Memberdayakan Masyarakat Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam Studi Kasus di Desa Sinar Palembang Kec. Candi Puro Kab. Lampung Selatan*, Jurnal Ekonomi Islam, (UIN Raden Intan Lampung, 2018)

- N. Daldjoeni, *Interaksi Desa Kota*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1987)
- Narwoko dan Bagong Suyanto, *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan* (Jakarta: Kencana, 2014)
- Numan, *Strategi Pembangunan Daerah*, (Jakarta: Rajawali Grafindo Persada, 2015)
- Nurcholis Hanif, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, (Jakarta: PT Gelora Aksara Pratama, 2011)
- Peraturan Menteri dalam Negri, *Tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat dalam*
[file:///C:/users/downloads/no_7_2007%20\(3\). Pdf](file:///C:/users/downloads/no_7_2007%20(3).pdf) (Akses tgl 28 Februari 2019)
- Rokki, *Peran Pemerintah Desa dalam Pemberdayaan Rumput Laut di Desa Burau Pantai*, (Skripsi IAIN Palopo Tahun 2016)
- Rosalih Abdullah, *pelaksanaan otonomi luas dengan pemilihan kepala daerah secara langsung*, (cet;III, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010)
- Samadi, *Interkasi Desa Dan Kota*, (Yogyakarta: Yudhistira, 2007)
- Shohib Muhammad, Ma, *Al-Quran Tajwid Dan Terjemahnya Dilengkapi Dengan Dengan Asbabun Nuzul dan Hadits Sahih*, (Bogor: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2007), h.5.
- Soekanto Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta Press, 2002)
- Suprastiyo Ahmad, *Peran Kepala Desa*, dalam <http://www.unigoro.ac.id/> (di Akses, tgl/20/02/2019).

Susanti Sri, *Peran Pemerintah Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Sukamaju Kecamatan Tenggarong*, Jurnal Ilmu Administrasi Negara, ISSN 0000-0000, ejournal.an.fisip-unmul.ac.id (diakses 3 Mei 2018).

Wijaya Muhammad Indra, *Peranan Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Di Bidang Pertanian (Studi: Desa Toapaya Selatan Kecamatan Toapaya Kabupaten Bintun)*”, Jurnal, (Tanjung Pinang: Universitas Maritime Raja Uli Haji, 2017, diakses 10 Agustus 2018)

Surat Keterangan Wawancara

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Hermawati

Nim : 15.04.01.0062

Menerangkan telah melaksanakan wawancara tentang **Peran Pemerintah Desa Dalam Upaya Pemberdayaan Ekonomi Di Desa Lumbewe Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur**, yang dilaksanakan pada tanggal 29 Juli 2019. Dengan informan:

Nama : Muhammad Bintang Andi Aras

Usia : 48 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pendidikan : S1

Pekerjaan : Kepala Desa Lumbewe

Alamat : Desa Lumbewe Kecamatan Burau

Demikian keterangan ini saya buat dengan sebenar-benarnya sebagai bukti telah melakukan wawancara.

Informan,

pewawancara,

Muhammad Bintang Andi Aras

Hermawati

Surat Keterangan Wawancara

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Hermawati

Nim : 15.04.01.0062

Menerangkan telah melaksanakan wawancara tentang **Peran Pemerintah Desa Dalam Upaya Pemberdayaan Ekonomi Di Desa Lumbewe Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur**, yang dilaksanakan pada tanggal 29 Juli 2019. Dengan informan:

Nama : Ependi Liku Ara'

Usia : 35 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pendidikan : S1

Pekerjaan : Ketua Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Desa Lumbewe

Alamat : Desa Lumbewe Kecamatan Burau

Demikian keterangan ini saya buat dengan sebenar-benarnya sebagai bukti telah melakukan wawancara.

Informan,

Pewawancara,

Ependi Liku Ara'

Hermawati

Surat Keterangan Wawancara

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Hermawati

Nim : 15.04.01.0062

Menerangkan telah melaksanakan wawancara tentang **Peran Pemerintah Desa Dalam Upaya Pemberdayaan Ekonomi Di Desa Lumbewe Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur**, yang dilaksanakan pada tanggal 29 Juli 2019. Dengan informan:

Nama : Abdul Latif

Usia : 69 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pendidikan : SMA

Pekerjaan : Petani

Alamat : Desa Lumbewe Kecamatan Burau

Demikian keterangan ini saya buat dengan sebenar-benarnya sebagai bukti telah melakukan wawancara.

Informan,

Pewawancara,

Abdul Latif

Hermawati

Riwayat Hidup Penulis



Hermawati dilahirkan pada tanggal 26 Oktober 1996 di Desa Lumbewe Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur. Penulis merupakan anak ke 7 (tujuh) dari 8 (delapan) bersaudara, anak dari Abdul Latif dan Rabbi.

Penulis pertama kali menempuh pendidikan Sekolah Dasar di SDN 103 Lumbewe pada tahun 2002-2009, lulus dari SD Lumbewe penulis melanjutkan pendidikannya ke jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) yaitu SMPN 2 Burau pada tahun 2009- 2012. Lulus dari

SMP Penulis melanjutkan lagi ke jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) yaitu SMAN 1 Burau pada tahun 2012-2015.

Pada tahun 2015 penulis melanjutkan lagi pendidikannya pada jenjang perkuliahan dan mendaftarkan diri Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, dan berhasil diterima pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam program studi Ekonomi Syariah. Pada akhir studinya panulis menyusun dan menyelesaikan sebuah skripsi dengan judul “ **Peran Pemerintah Desa Dalam Upaya Pemberdayaan Ekonomi Di Desa Lumbewe Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur,**” sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan **studi** pada jenjang strata satu (S1) Dan berhasil memperoleh gelar ekonomi syariah (SE).